



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

**Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 100.3.6/10/II/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/02/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. membantu PPK dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/10/II/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) LINGKUP BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SALAWATI, S.E. NIP. 19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
2.	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
4.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
2.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
2.	Pemeliharaan Mebel	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP. 19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Hukum	PPTK
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
2.	Koordinasi Penelaahan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
5.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
6.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
2.	Pembinaan dan Pemamfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dr. Ir. H. RISBAR, N. R. G, S.Hut., M.Si NIP. 19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan	PPTK
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
5.	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel. NIP. 19770328 200604 1 019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PPTK
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)			
1.	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
5.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
7.	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	M. SYUKRI SALLATU, S.T. NIP. 19720204 200604 1 017	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	PPTK
IV. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				
1.	Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
2.	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK



NO	PROGRAM / KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
3.	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
4.	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
2.	Invensi dan Inovasi			
1.	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
2.	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK
3.	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	NASRUDDIN T, S.E., M.Si. NIP. 19740719 201101 1 002	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah	PPTK



a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

